

2020

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU UTARA**



JL. SIMPURUSIANG NO. 27 GABUNGAN DINAS LANTAI II
MASAMBA-KAB. LUWU UTARA



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020. Dokumen renja disusun untuk memenuhi kewajiban setiap instansi

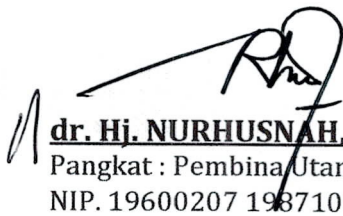
Dalam lingkup pemerintah kabupaten Luwu Utara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan perlindungan Anak dalam rangka pencapaian Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu **“Terwujudnya Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Luwu Utara Damai, Aman dan Sejahtera”** Renja ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak serta pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusunan dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan, oleh karenanya masukan dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja selanjutnya. Akhirnya kami berharap semoga dokumen ini dapat mewujudkan Keadilan Gender dan hak-hak anak Luwu Utara terpenuhi.

Masamba, Januari 2019

 **Kepala Dinas,**


dr. Hj. NURHUSNAH, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19600207 198710 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
TAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DP2PA TAHUN 2018.....	11
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD	11
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	12
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	14
D. Review Terhadap rancangan Renja.....	15
E. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	16
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	18
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	18
B. Tujuan dan Sasaran Renja.....	20
C. Program dan Kegiatan.....	23
BAB 1V PENUTUP.....	25
A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.....	25
B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	26
C. Renja Tindak Lanjut.....	27
LAMPIRAN.....	28
TABEL 1	
TABEL 2	
TABEL 3	
TABEL 4	
TABEL 5	

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan refleksi dari semangat reformasi yang pada hekekatnya mengamanatkan dilaksanakan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah, yang secara jelas memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Luwu Utara, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, dimana Tahun 2019 adalah tahun keempat penyusunan Dokumen Perencanaan, dimana Periode RPJMD 2016 s/d 2021 telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis 2016 s/d 2021 yang dilanjutkan dengan Penyusunan Rencana Kerja 2019.

Tahun 2020 merupakan tahun kelima Perencanaan Pembangunan Daerah dari RPJMD 2016 s/d 2021 Kabupaten Luwu Utara. Akan tetapi untuk mengisi kekosongan acuan dalam menyusun Rencana Kerja SKPD maka RPJMD

Kabupaten dan Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021 tetap merupakan dokumen perencanaan yang sah untuk menjadi acuan. Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020²¹ adalah Program dan kegiatan yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara mengacu pada kebutuhan dan permasalahan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai target dan sasaran yang tercantum dalam RKPD serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara tahun 2016 s/d 2021.

Pelaksanaan RPJMD Kab. Luwu Utara Tahun 2016 s/d 2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) Kab. Luwu Utara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon Anggaran serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (RAPBD).

Rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 1 (Satu) tahun kedepan. Secara umum Renja SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam satu tahun ke depan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam melaksanakan program kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dilandasi dengan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 4585);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 Mengenai Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk kekerasan pekerjaan terburuk anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak;
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan penata ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan pertanggung

jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak;
23. Keputusan Presiden RI Nomor 39 tahun 1990 tentang Pengesahan Konveksi Hak Anak
24. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan pekerjaan terpuruk bagi anak
25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2009 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan;

28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana tata Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;
37. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 24);
38. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Pembangunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
39. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Renja adalah untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu lingkup kerja yang ada pada lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk secara konsisten sesuai dengan posisi dan peran yang sesuai dengan posisi dan peran yang diemban untuk jangka satu tahun.

2. Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam rangka mendukung maksud dan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar Penyusunan Renja, landasan hukum Penyusunan Renja, maksud dan tujuan Penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. EVALUASAI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

SKPD	CAPAIAN KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT		KRITERI CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN					KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN
	(100%) 2018 (%)	(00%) 2016-2021 (%)	2017	2016-2021	JUMLAH	REN-DAH (%)	SESUAI TARGET (%)	MELEBIHI TARGET (%)	TDK TERLAKSANA (%)	% YANG MEMENUHI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DINAS P2PA	86	89	tinggi	- Tinggi	9	1	26	3	4	Tinggi
	87	94	tinggi	- tinggi	29	0	86,21	8,82	13,79	

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tabel 1, Capaian kinerja *outcome* (program) dan *output* (kegiatan) SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 pada Renja masing-masing sebesar 86% dan 87% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah **TINGGI**, dan dari capaian tersebut 25 kegiatan dari 29 total kegiatan yang ada telah mencapai target diatas 86,21%, sementara 4 kegiatan yang sudah melebihi target atau 13,79%, sedangkan untuk kegiatan yang tingkat capaian rendah tidak ada atau 0,00%.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada table 1.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Capaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijabarkan pada lampiran.

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan urusan wajib terdapat 2 sasaran dan 22 indikator. Sasaran dan indikator tersebut merupakan penjabaran dari Misi Ketiga RPJMD. Pada tahun 2018 target berdasarkan indikator sasaran yang masih mengacu pada fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tahun 2019 target indikator sasaran telah mengacu berdasarkan fungsi pelayanan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan dengan indikator sasaran yaitu :
 - Indeks Pembangunan Gender
 - Indeks Pemberdayaan Gender
 - Presetase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
 - Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

- ✚ Persentase SKPD yang memenuhi 50 % prasyarat PUG
 - ✚ Persentase SKPD menerapkan PPRG
 - ✚ Rasio KDRT
 - ✚ Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan
 - ✚ Persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas
2. Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan anak dan perempuan dengan indikator yaitu :
- ✚ Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
 - ✚ Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur
 - ✚ persentase desa kelurahan layak anak (Dekela) yang memenuhi indikator ketahanan keluarga
 - ✚ Jumlah DEKELA yang memenuhi 70 % indikator KLA
 - ✚ Persentase pengaduan kasus kekerasan yang ditindaklanjuti
 - ✚ Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit.
 - ✚ Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
 - ✚ Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

- ✚ Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyelidikan sampai dengan keputusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak
- ✚ Cakupan perempuan dan anak korbankekerasan yang mendapat layanan hukum
- ✚ Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- ✚ Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Keseluruhan indikator kinerja pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara serta realisasi pencapaiannya dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 2.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Tingginya jumlah pernikahan dini di Kabupaten Luwu Utara
2. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan
3. Rendahnya pemenuhan indikator Kabupaten/kecamatan layak anak serta sekolah ramah anak.
4. Rendahnya partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten/Kota

5. Rendahnya persentase perempuan dalam posisi pengambil kebijakan di lembaga pemerintah
6. Terbatasnya layanan bantuan hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh perempuan dan anak korban kekerasan
7. Masih rendahnya pembinaan organisasi perempuan, rendahnya komitmen pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kecamatan
8. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perdagangan manusia (trafficking) dan banyaknya keluhan masyarakat dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang didapat yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan Rancangan Renja SKPD.

Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Berdasarkan

Rancangan awal yang dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hasil analisis kebutuhan dapat diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2019²⁰ sesuai dengan lampiran 3 evaluasi rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses bottom up melalui mekanisme musrenbang yang disesuaikan dengan hasil renstra Kabupaten Luwu Utara, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target.

Review terhadap rancangan awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara tahun 2019²⁰ secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.

E. PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan dan keinginan masyarakat melalui Musrenbang Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Utara mengaju pada rancangan awal RKPD Kabupaten Luwu Utara, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Utara serta usulan dari masyarakat. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Utara

selalu diselaraskan dengan kebijakan umum kepala daerah dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan Pusat sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi Nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Berdasarkan hasil rumusan aspirasi dari para pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sekaligus merupakan Program dan kegiatan yang merupakan bagian dari isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Adapun usulan program dan kegiatan dari pada pemangku kepentingan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Utara, disusun berpedoman pada RPJMN tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 dan RPJMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional. Kebijakan dan strategis Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai satu departemen yang terkait :

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :
 - 1) Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
 - 2) Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
 - 3) Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak
 - 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Pemberdayaan Perempuan & PA.

Adapun arah kebijakan dan Strategi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan termasuk dalam nawacita adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelaksanaan pegasusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
- b. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak diberbagai tindak kekerasan.
- c. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus serta meningkatnya perlindungan anak.
- d. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat, meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran, meningkatnya kelembagaan data terpilah dan data anak, meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas kemen PPPA, meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kemen PPPA dan meningkatnya telaan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta program perlindungan anak.

Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah ***"SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING KESEJAHTERAAN MASYARAKAT "***.

Untuk mewujudkan visi, diuraikan kedalam 7 (tujuh) misi yang akan dijalankan pada 5 (lima) tahun kedepan :

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum.
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan visi Kabupaten Luwu Utara yaitu : **“LUWU UTARA YANG RELIGIUS DENGAN PEMBANGUNAN BERKUALITAS DAN MERATA YANG BERLANDASKAN KEARIFAN LOKAL”**

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

		Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	0
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	100
		cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	77
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75
		cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan keputusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak	80%
		Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan hukum	100%
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak	100%

pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak selama lima tahun

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada Dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

MISI III : mewujudkan peran perempuan dan anak dalam pembangunan.			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator Sasaran pada Tahun 2018
Mewujudkan peran perempuan dan anak dalam pembangunan	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender	90
		Indeks pemberdayaan gender	70
		Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan	75
		Partisipasi perempuan dilembaga swasta	27
		Rasio KDRT	0,03
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	100
		Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	0
MISI III : Mewujudkan kualitas hidup serta perlindungan anak dan perempuan.			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator Sasaran pada tahun 2018
Mewujudkan Kualitas Hidup serta Perlindungan anak dan perempuan	Meningkatnya Kualitas Hidup serta Perlindungan anak dan perempuan	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	77

		korban kekerasan	
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan korban kekerasan	100

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada Visi dan Misi, serta Pencapaian MDGs Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Utara terkait erat dengan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara maupun dengan Visi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Luwu Utara dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika Pembangunan Daerah. Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, adalah ***Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal.*** Dengan Misi yang dicanangkan :

1. Mewujudkan Masyarakat yang religius, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya.
2. Mewujudkan Derajat Kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni
3. Mewujudkan pendidikan berkuatitas, prestasi, kepemudaan, ketahanan budaya.
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata.

BAB IV PENUTUP

A. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam pelaksanaan Penyusunan serta Penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan di tujukan untuk meningkatkan kualitas Perencanaan dan Produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2021, Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh Optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan Sinkronisasi antar kegiatan dan Program.

Untuk memperoleh keterpaduan dan Sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses Musrenbang melalui tahapan Forum SKPD, agar Program/ Kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

B. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 54 Tahun 2010, maka ditetapkan Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2020 sebagai berikut

1. Didalam penyusunan Renja Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
2. Didalam penyusunan Renja Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020, masih belum sempurna terkait dengan terbitnya Permendagri No. 27 Tahun 2014 pemahaman tentang tata cara penyusunan masih berbeda-beda.
3. Renja Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dalam rangka Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi Sulawesi Selatan maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada dibawahnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten dan RPJMD Kabupaten RKPD Kabupaten dan Renstra Badan)

C. RENCANA TINDAK LANJUT

- Perlu peningkatan kapasitas SDM Aparatur Perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus dilalui melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar, serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana
- Pencapaian kinerja senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam perencanaan serta program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Utara dengan sumber dana yang tersedia dan Proporsional dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak periode 2016-2021 yaitu : ***"Terwujudnya Kesenjangan, Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak menuju Luwu Utara Damai, Aman dan Sejahtera"***

Masamba, Januari 2019

KEPALA DINAS,



dr. Hj. NURHUSNAH, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19600207 198710 2 001

TABEL 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU UTARA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2019) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2020	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2. 02. 01. 01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presentase capaian administrasi perkantoran	100 %				63	100		108,78
2. 02. 01. 01. 01.	penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bahan material dan benda pos yang diadakan	2000 surat	500	500	500	100	500	1500	75,00
2. 02. 01. 01. 02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa TV Kabel yang dibayarkan	1 unit	1	100		1	1	1	100,00
2. 02. 01. 01. 06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang dibayarkan biaya servicenya	1 unit	1	1		100	1	1	100,00
2. 02. 01. 01. 08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah orang yang menerima jasa cleaning service	1 orang	1	100		1	1	1	100,00
2. 02. 01. 01. 12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 Pt	1	1	1	1	1	1	100,00

2. 02. 01. 01. 15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang diadakan	21 jenis	4	4	4	100	5	13	61,90
2. 02. 01. 01. 18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah aparat yang melaksanakan konsultasi& koordinasi keluar daerah	15 org	15	10	10	100	10	35	233,33
2. 02. 01. 01. 19.	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, ketatausahaan dan Asset Daerah	Jumlah pengandaan dokumen penatausahaan keuangan,administrasi kepegawaian,ketatausahaan dan aset daerah	12 bln	12	12	12	100	12	12	100,00
2. 02. 01. 02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%				100			84,00
2. 02. 01. 02. 09.	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang diadakan	5 paket	1	1	1	100	1	1	20,00
2. 02. 01. 02. 10.	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan	1 Paket	1	1	1	100	1	1	100,00
2. 02. 01. 02. 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 unit	1	1	1	100	1	3	60,00
2. 02. 01. 02. 28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1	1	1	100	1	1	100,00
2. 02. 01. 02. 29.	Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair	Jumlah meubelair kantor yang terpelihara	5 Jenis	2	4	4	100	1	7	140,00
2. 02. 01. 05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kualitas SDM Aparatur	100%				100			68,00
2. 02. 01. 05. 03.	Bimbingan Teknis implementasi perundang-undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	25 orang	5	7	7	100	5	17	68,00
2. 02. 01. 06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase Capaian sistem pelaporan kinerja	100%				100			100,00

2. 02. 01. 06. 05.	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen LAKIP / LPPD yang disusun	2 Dok	2	2	2	100	2	2	100,00
2. 02. 01. 06. 06.	penyusunan dokumen perencanaan SKPD	jumlah rencana kerja yang tersusun RENJA	4 Dok	4	4	4	100	4	4	100,00
2. 02. 01. 09.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN	Prosentase Peningkatan kualitas SDM Aparatur	100				100			75,00
2. 02. 01. 09. 01.	Kunjungan kerja bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah tingkat atas/ Unit kerja terkait	Jumlah Kunjungan kerja bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah tingkat atas/ Unit kerja dan pihak lainnya yang telah diikuti	20 orang	20	15	15	100	15	15	75,00
2. 02. 01. 15.	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Persentase pemenuhan hak Anak dan Perempuan atas kebijakan PEMDA terhadap KLA & KELANA	100 %				100			87,50
2. 02. 01. 15. 01.	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah dokumen PERDA PUG	1 Dok	1	1	1	100	1	1	100,00
2. 02. 01. 15. 03.	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	jumlah pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembagunan yang dilaksanakan	240 orang	60	60	60	100	60	180	75,00
2. 02. 01. 16.	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase rata-rata keterlibatan kelembagaan dalam pemberdayaan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%				100			85,05

2. 02. 01. 16. 01.	Advokasi dan Fasilitas PUG bagi Perempuan	Jumlah perempuan yang mendapatkan advokasi penguatan ekonomi masyarakat	230 Orang	0	50	50	100	20	70	30,43
2. 02. 01. 16. 02.	Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	jumlah layanan UPT P2TP2A yang memberikan layanan di tingkat kabupaten	1 layanan	0	1	1	100	1	1	100,00
		jumlah SELTER warga yang dibentuk dan dibina	9 selter	9	9	9	100	9	9	100,00
2. 02. 01. 16. 04.	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	jumlah brosur / leaflet KIE / Buku yang diadakan	5 Jenis	0	6	6	100	5	5	100,00
2. 02. 01. 16. 05.	Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak	jumlah rapat koordinasi pokja PUG	12 kali	0	2	2	100	4	6	50,00
2. 02. 01. 16. 06.	Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Forum Anak yang terbentuk dan terbina	12 Klp. Forum (Kec)	1	12	12	100	12	12	100,00
2. 02. 01. 16. 08.	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) yang diadakan	1 Dok	0	1	1	100	1	1	100,00
2. 02. 01. 16. 08.	Pemberdayaan lembaga yang berbasis Gender	Jumlah layanan yang berbasis gender	1 layanan	1	1	1	100	1	1	100,00
2. 02. 01. 17.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus KDRT yang terselesaikan	100%				100			142,86
2. 02. 01. 17. 08.	Fasilitasi Upaya Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah jenis kasus yang ditindaklanjuti	7 Jenis	0	5	5	100	5	10	142,86

2.	02.	01.	18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Pesertase Masyarakat/Lembaga yang mengikuti upaya peningkatan SDM Pemenuhan hak perempuan dan anak	100%					100			137,99
2.	02.	01.	18.	01.	Pembinaan Organisasi Perempuan	jumlah organisasi perempuan yang terbina	105 organisasi	25	25	25	100	25	75	71,43
					pendidikan dan pelatihan peran serta kesetaraan gender	jumlah orang (SKPD) yang mengikuti pelatihan PPRG	88 Orang	88	32	32	100	60	180	204,55
				CAPAIAN KINERJA OUT COME							86			89%
				CAPAIAN KINERJA OUT PUT							87			94%

Masamba, Januari 2019
KEPALA C KEPALA DINAS,

dr. Hj. NURHUSNAH, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19600207 198710 2 001

TABEL 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU/Mandiri	Target Renstra							Realisasi Capaian				Proyeksi		catatan Analisis	CAPAIAN KINERJA SASARAN		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Laporan Keuangan Tepat waktu sesuai SAP	-	Mandiri	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			#DIV/0!	100,00		
2	Indeks Pembangunan Gender	-	IKK	90	92	95	97	99	99	90	88,68	89	97	99			100	96,39		
3	Indeks pemberdayaan Gender	-	IKK	70	75	80	85	90	90	70	43,74	45	85	90			100	58,32		
4	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	-	IKK	75	77	79	81	85	85	75	55,65	56,7	81	85			100	72,27		
5	persentase partisipasi perempuan di lembaga Swasta	-	IKK	27	30	32	35	40	40	27	40,51	41	35	40			100	135		
6	Persentase Jumlah Perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif	-	IKK	5,71	5,71	5,71	5,71	30,00	30,00	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71			#VALUE!	#VALUE!		
7	Rasio KDRT	-	IKU	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01			#VALUE!	#VALUE!		
8	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	-	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90			100	100		
9	persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	-	IKU	77	80	83	85	90	90	70	80	83	85	90			90,91	100		
10	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	SPM		80	85	87	90	95	95	100	85	87	100	95			125	100		
11	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Kesehatan terlatih di Puskesmas mampu terlaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	SPM		55	65	70	80	90	95	55	65	70	80	90			100,00	100		
12	cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	SPM		77	80	83	85	90	90	77	0	0	85	90			100	0		
13	cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	SPM		75	75	75	75	75	75	75	0	0	75	75			100	0		
14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan	SPM		100	100	100	100	100	100	80	100	100	87	100			80	100		
15	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan hukum	SPM		100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0			100	0		
16	Persentase keluarga yang memenuhi indikator ketahanan keluarga		IKU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	persentase pengaduan kasus kekerasan yang ditindak lanjuti		IKU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100		
18	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak	-	IKU	16	16	16	16	16	16	12	12	16	16	16			75	75		

75

Masamba, Juni 2019
Kepala Dinas,

dr. Hj. NURHUSNAH, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19600207 198710 2 001

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2020
TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN LUWU UTARA

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (HASIL ASISTENSI FINAL)				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 02. 01. 01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	DP2PA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	460.000.000	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	DP2PA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	509.000.000
2. 02. 01. 01. 01.	1 penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP2PA	Jumlah Surat Terkirim	1000 surat	1.000.000	penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP2PA	Jumlah Surat Terkirim	1000 surat	1.000.000
2. 02. 01. 01. 12.	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	DP2PA	Jumlah komponen instalasi listrik layak pakai yang tersedia	4 jenis	1.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	DP2PA	Jumlah komponen instalasi listrik layak pakai yang tersedia	4 jenis	1.000.000
2. 02. 01. 01. 06.	3 Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	DP2PA	Tercapainya pelayanan jasa komunikasi	1 PT	10.000.000	penyedia jasa Pemeliharaan dan perizinan kenadaraan Dinas/Operasional	DP2PA	Tercapainya pelayanan jasa komunikasi	1 PT	10.000.000
2. 02. 01. 01. 08.	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DP2PA	Tercapainya pelayanan Kebersihan kantor	1 org	12.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DP2PA	Tercapainya pelayanan Kebersihan kantor	1 org	12.000.000
2. 02. 01. 01. 15.	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DP2PA	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis	11.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DP2PA	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis	15.000.000
2. 02. 01. 01. 18.	6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	DP2PA	Jumlah aparat yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi sekretariat	10 org	250.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	DP2PA	Jumlah aparat yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi sekretariat	10 org	270.000.000
2. 02. 01. 01. 19.	7 Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, ketatausahaan dan Asset lainnya	DP2PA	Jumlah dokumen Penatausahaan administrasi, i kepegawaian ketatausahaan dan asset yang disusun	4 dok	175.000.000	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, ketatausahaan dan Asset lainnya	DP2PA	Jumlah dokumen Penatausahaan administrasi, i kepegawaian ketatausahaan dan asset yang disusun	4 dok	200.000.000
2. 02. 01. 02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	DP2PA	Meningkatnya pelayanan kepegawaian	80 %	140.500.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	DP2PA	Meningkatnya pelayanan kepegawaian	80 %	125.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (HASIL ASISTENSI FINAL)				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 02. 01. 02. 09.	1 Pengadaan Peralatan gedung Kantor	DP2PA	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 jenis	75.000.000	1 Pengadaan Peralatan gedung Kantor	DP2PA	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 jenis	75.000.000
2. 02. 01. 02. 10.	2 Pengadaan Mebeleur	DP2PA	Jumlah mebeluer yang diadakan	2 unit	15.500.000	2 Pengadaan Mebeleur	DP2PA	Jumlah mebeluer yang diadakan	2 unit	20.000.000
	3 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	DP2PA	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	5.000.000	3 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	DP2PA	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	5.000.000
2. 02. 01. 02. 22.	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DP2PA	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 unit	10.000.000	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DP2PA	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 unit	10.000.000
2. 02. 01. 02. 24.	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	DP2PA	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	1 Jenis	35.000.000	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	DP2PA	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	1 Jenis	15.000.000
2. 02. 01. 05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	DP2PA	peningkatan kualitas SDM aparatur	87 %	100.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		peningkatan kualitas SDM aparatur	87 %	120.000.000
2. 02. 01. 05. 03.	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DP2PA	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek	7 org	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DP2PA	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek	7 org	120.000.000
2. 02. 01. 06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPOARAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	DP2PA	Tersedianya laporan capaian kinerja keuangan daerah	90 %	100.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPOARAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Tersedianya laporan capaian kinerja keuangan daerah	90 %	100.000.000
2. 02. 01. 06. 05.	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP2PA	Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang di susun	1 dok	15.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP2PA	Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang di susun	1 dok	15.000.000
	2 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	DP2PA	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun	6 dok	85.000.000	Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD	DP2PA	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun	6 dok	85.000.000
2. 02. 01. 09.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN	DP2PA	Terlaksananya pelayanan kedinasan	90 %	70.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN	DP2PA	Terlaksananya pelayanan kedinasan	90 %	100.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (HASIL ASISTENSI FINAL)				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 02. 01. 09. 01.	1 Pelayanan Administrasi Kedinasan Pada UPTD	DP2PA	Jumlah UPT P2TP2A yang Mendapat Dana Operasional	1 UPT	70.000.000	Pelayanan Administrasi Kedinasan Pada UPTD	DP2PA	Jumlah UPT P2TP2A yang Mendapat Dana Operasional	1 UPT	100.000.000
2. 02. 01. 15.	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	DP2PA	Persentase pemenuhan hak Anak dan Perempuan atas kebijakan PEMDA terhadap KLA & KELANA	85 %	446.000.000	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	DP2PA	Persentase pemenuhan hak Anak dan Perempuan atas kebijakan PEMDA terhadap KLA & KELANA	85 %	450.000.000
2. 02. 01. 15. 01.	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas 1 Hidup Perempuan dan Anak	DP2PA	Jumlah Administrasi Kedinasan pada UPT P2TP2A Kab. Luwu Utara	3 Jenis	96.000.000	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	DP2PA	Jumlah Kebijakan/ Perda, Perbup PUG	3 Jenis	100.000.000
	Monitoring, evaluasi 2 dan Pelaporan	DP2PA	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yg dilaksanakan	15 Kec.	350.000.000	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	DP2PA	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yg dilaksanakan	15 Kec.	350.000.000
2. 02. 01. 16.	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	DP2PA	Persentase rata-rata keterlibatan kelembagaan dalam pemberdayaan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	85 %	770.000.000	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	DP2PA	Persentase rata-rata keterlibatan kelembagaan dalam pemberdayaan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	95 %	770.000.000
2. 02. 01. 16. 01.	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Kec.	Jumlah orang yang mendapatkan advokasi Potensi	20 orang	60.000.000	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Kec.	Jumlah orang yang mendapatkan advokasi Potensi	20 orang	60.000.000
2. 02. 01. 16. 02.	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Kec.	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi layanan P2TP2A	9 Selter	250.000.000	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Kec.	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi layanan P2TP2A	9 Selter	250.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (HASIL ASISTENSI FINAL)				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 02. 01. 16. 04.	3 Pengembangan Materi dan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Kab./Prov.	Jumlah brosur/Lifleat/spanduk/ Banner/stiker/iklan media KIE Kesetaraan Gender	5 Jenis	65.000.000	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Kab./Prov.	Jumlah brosur/Lifleat/spanduk/ Banner/stiker/iklan media KIE Kesetaraan Gender	5 Jenis	65.000.000
2. 02. 01. 16. 05.	4 Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak		Jumlah koordinasi pokja PUG dan Pokja Forum Data	50 orang	60.000.000	Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak		Jumlah koordinasi pokja PUG dan Pokja Forum Data	50 orang	60.000.000
2. 02. 01. 16. 06.	5 Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kab/Prov./ Pusat	Jumlah Forum Anak yang terbentuk dan terbina	15 Klp. Forum (Kec)	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kab/Prov./ Pusat	Jumlah Forum Anak yang terbentuk dan terbina	15 Klp. Forum (Kec)	200.000.000
2. 02. 01. 16. 08.	6 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Kab	Jumlah dokumen profil gender dan anak yang disusun	1 dokumen	55.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Kab	Jumlah dokumen profil gender dan anak yang disusun	1 dokumen	55.000.000
2. 02. 01. 16. 10.	7 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender	Kab./Prov.	Jumlah layanan PUSPAGA yang terbina	1 Layanan PUSPAGA	80.000.000	Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender	Kab./Prov.	Jumlah layanan PUSPAGA yang terbina	1 Layanan PUSPAGA	80.000.000
2. 02. 01. 17.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		Persentase Kasus KDRT yang terselesaikan	85 %	50.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		Persentase Kasus KDRT yang terselesaikan	89 %	50.000.000
2. 02. 01. 17. 08	1 Upaya Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Kab./Prov.	Jumlah jenis kasus KtP/KtA yang ditindaklanjuti	5 Jenis	50.000.000	1 Upaya Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Kab./Prov.	Jumlah jenis kasus KtP/KtA yang ditindaklanjuti	5 Jenis	50.000.000
2. 02. 01. 18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	DP2PA	Pesertase Masyarakat/Lembaga yang mengikuti upaya peningkatan SDM Pemenuhan hak perempuan dan anak	75 %	165.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	DP2PA	Pesertase Masyarakat/Lembaga yang mengikuti upaya peningkatan SDM Pemenuhan hak perempuan dan anak	97 %	165.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (HASIL ASISTENSI FINAL)				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 02. 01. 18. 01	1 Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab.	Jumlah organisasi perempuan yang terbina	25 organisasi	50.000.000	1 Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab.	Jumlah organisasi perempuan yang terbina	25 organisasi	50.000.000
2. 02. 01. 18. 02	2 Pendidikan dan Pelatihan Peranserta Kesenjangan Gender	Kab.	Jumlah orang (SKPD) yang mengikuti pelatihan PPRG	60 Orang (32 SKPD)	60.000.000	2 Pendidikan dan Pelatihan Peranserta Kesenjangan Gender	Kab.	Jumlah orang (SKPD) yang mengikuti pelatihan PPRG	60 Orang (32 SKPD)	60.000.000
2. 02. 01. 18. 03	3 Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera	Kab./Kec.	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan/advokasi indikator ketahanan keluarga	40 Orang (kel. Rentan)	55.000.000	3 Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera	Kab./Kec.	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan/advokasi indikator ketahanan keluarga	40 Orang (kel. Rentan)	55.000.000
2. 02. 01. 19.	PROGRAM PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persetase upaya Pemenuhan Hak Khusus anak	92 %	100.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persetase upaya Pemenuhan Hak Khusus anak	92 %	100.000.000
program baru	1 Perlindungan anak berbasis masyarakat	Kab/Kec.	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan perlindungan anak berbasis masyarakat	15 kec	100.000.000	1 Perlindungan anak berbasis masyarakat	Kab/Kec.	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan perlindungan anak berbasis masyarakat	15 kec	100.000.000
	JUMLAH				2.401.500.000	JUMLAH				2.489.000.000

Masamba, Januari 2019

KEPALA DINAS,

dr. Hj. NURHUSNAH, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19600207 198710 2 001

Tabel 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemenuhan Hak Anak				
	Sosialisasi Pernikahan Usia Anak	SMA 5 LUWU UTARA Kelurahan Marobo, UPT Lara Utama (Desa Mutmainna), UPT SMPN 4 BONE-BONE, SMK Budi Bangsa desa sumber dadi	jumlah anak yang mengikuti sosialisasi	15 Kecamatan	Kegiatan ini sangat diharapkan, mengingat pernikahan Anak Usia Dini masih tinggi
	Sosialisasi Anti Bullying	SMPN 1 SABBANG SELATAN / DESA POMPANIKI, SMP 2 SATAP SABBANG SELATAN, SMPN 1 Baebunta Sekatan Desa Sumpira, SMPN 1 Tana Lili, MTS Salubongko (Desa Cenning), SMPN 5 BAEBUNTA (Desa Tarobok), SMPN 3 SABBANG SELATAN, SDN 033 AWO-AWO (Desa Tarobok), SMPN 5 BAEBUNTA (Desa Tarobok), SDN 043 Tete Indu (Desa Marannu), SMPN 1 sukamaju (Desa Mulyorejo), SDN 1 KALUKU, UPT SMPN 2 MALANGKE, SDN 194 Waelawi (desa waelawi), SMPN 1 Malangke Barat (Desa Pao), SDN 159 Pembuniang (Desa Pembuniang), SDN KUAU, SMPN 1 MASAMBA, UPT SMPN 6 Bone-Bone,	Jumlah Sosialisasi yang di adakan di Sekolah	15 Kecamatan	Kegiatan ini sangat diharapkan mengingat kekerasan terhadap anak masih sering terjadi dilingkungan keluarga maupun dilingkungan sekolah

Masamba, Maret 2019
Kepala Dinas,

dr. Hj. NURHUSNAH, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19600207 198710 2 001

TABEL 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN LUWU UTARA

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 02. 01. 01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	DP2PA	95 %	460.000.000	APBD		95 %	509.000.000
2. 02. 01. 01. 01.	1. penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	DP2PA	500 surat	1.000.000	APBD		500 surat	1.000.000
2. 02. 01. 01. 02.	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	Jumlah komponen instalasi listrik layak pakai yang tersedia	DP2PA	4 jenis	1.000.000	APBD		1 PT	1.000.000
2. 02. 01. 01. 06.	3. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	Tercapainya pelayanan jasa komunikasi	DP2PA	1 PT	10.000.000	APBD		1 PT	10.000.000
2. 02. 01. 01. 08.	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya pelayanan Kebersihan kantor	DP2PA	1 org	12.000.000	APBD		1 org	12.000.000
2. 02. 01. 01. 15.	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	DP2PA	4 jenis	11.000.000	APBD		4 jenis	15.000.000
2. 02. 01. 01. 18.	6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah aparat yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi sekretariat	DP2PA	10 org	250.000.000	APBD		10 org	270.000.000
2. 02. 01. 01. 19.	7. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, ketatausahaan dan Asset lainnya	Jumlah dokumen Penatausahaan administrasi, kepegawaian ketatausahaan dan asset yang disusun	DP2PA	4 dok	175.000.000	APBD		4 dok	200.000.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 02. 01. 02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya pelayanan kepegawaian	DP2PA	95 %	140.500.000	APBD		95 %	125.000.000
2. 02. 01. 02. 09.	1. Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	DP2PA	5 jenis	75.000.000	APBD		1 paket	75.000.000
2. 02. 01. 02. 10.	2. Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeluer yang diadakan	DP2PA	2 unit	15.500.000	APBD		2 Jenis	20.000.000
	3 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan gedung kantor	DP2PA	1 paket	5.000.000	APBD		1 paket	5.000.000
2. 02. 01. 02. 22.	4 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	DP2PA	1 unit	10.000.000	APBD		1 unit	10.000.000
2. 02. 01. 02. 24.	5 Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	DP2PA	1 Jenis	35.000.000	APBD		1 Jenis	15.000.000
2. 02. 01. 05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	peningkatan kualitas SDM aparatur	DP2PA	95 %	100.000.000	APBD		95 %	120.000.000
2. 02. 01. 05. 03.	Bimbingan Teknis 1. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek	Luar Wiayah	7 org	100.000.000	APBD		7 org	120.000.000
2. 02. 01. 06.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAKSANAAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja keuangan daerah	DP2PA	90 %	100.000.000	APBD		90 %	100.000.000
2. 02. 01. 06. 01.	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang di susun	DP2PA	1 dok	15.000.000	APBD		1 dok	15.000.000
	2. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun	DP2PA	6 dok	85.000.000	APBD			85.000.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 02. 01. 09.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN	Terlaksananya pelayanan kedinasan	UPT P2TP2A	95 %	70.000.000	APBD		95 %	100.000.000
2. 02. 01. 09. 2	1. Pelayanan Administrasi Kedinasan pada UPTD	Jumlah Administrasi Kedinasan pada UPT P2TP2A Kab. Luwu Utara	UPT P2TP2A	1 paket	70.000.000	APBD		1 paket	100.000.000
2. 02. 01. 15.	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Presentase Kecamatan/Kota Layak Anak	DP2PA	25 %	446.000.000	APBD		25 %	450.000.000
2. 02. 01. 15. 01.	1. Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	- Jumlah rumusan kebijakan yang disusun	DP2PA	1 Dok	96.000.000	APBD		1 Dok	100.000.000
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Desa/Kel. Yang dibina dalam pemenuhan indikator DEKELA	DP2PA	173 Desa/Kel	350.000.000	APBD		173 Desa/Kel.	350.000.000
2. 02. 01. 16.	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase institusi/lembaga yang diberdayakan	DP2PA	90 %	770.000.000	APBD		90 %	770.000.000
2. 02. 01. 16. 01.	1. Advokasi PUG bagi Perempuan	Jumlah orang yang - mendapatkan advokasi Potensi	DP2PA	20 orang	60.000.000	APBD		20 orang	60.000.000
2. 02. 01. 16. 02.	2. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	- Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi layanan P2TP2A	Kecamatan	9 Selter	250.000.000	APBD		9 Selter	250.000.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 02. 01. 16. 04.	3 Pengembangan Materi dan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Jumlah brosur/Lifleaf/spanduk/Banner /stiker/iklan media KIE Kesetaraan Gender	DP2PA	5 Jenis	65.000.000	APBD		5 Jenis	65.000.000
2. 02. 01. 16. 05.	4 Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah koordinasi pokja PUG dan Pokja Forum Data	Kabupaten	50 orang	60.000.000	APBD		50 orang	60.000.000
2. 02. 01. 16. 06.	5 Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Forum Anak yang terbentuk dan terbina	Kab/Kec	15 Klp. Forum (Kec)	200.000.000	APBD		15 Klp. Forum (Kec)	200.000.000
2. 02. 01. 16. 08.	6 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah dokumen profil gender dan anak yang disusun	DP2PA	1 dokumen	55.000.000	APBD		1 dokumen	55.000.000
2. 02. 01. 16. 10.	7 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender	Jumlah layanan PUSPAGA yang terbina		1 Layanan PUSPAGA	80.000.000	APBD		1 Layanan PUSPAGA	80.000.000
2. 02. 01. 17.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Kecamatan/Desa yang menerapkan SPM Layanan terpadu bidang perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan	DP2PA	25 %	50.000.000	APBD		25 %	50.000.000
2. 02. 01. 17. 08	1 Upaya Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah jenis kasus KtP/KtA yang ditindaklanjuti	Kabupaten	5 Jenis	50.000.000	APBD		5 Jenis	50.000.000
2. 02. 01. 18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Persentase Partisipasi perempuan dilemabaga pemerintah	DP2PA	90 %	165.000.000	APBD		90 %	165.000.000
2. 02. 01. 18. 01	1 Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah oranisasi perempuan yang terbina	Kabupaten	25 organisasi	50.000.000	APBD		25 organisasi	50.000.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 02. 01. 18. 02	Pendidikan dan Pelatihan Peranserta Kesetaraan Gender	Jumlah orang (SKPD) yang mengikuti pelatihan PPRG	Kabupaten	60 Orang (32 SKPD)	60.000.000	APBD		60 Orang (32 SKPD)	60.000.000
2. 02. 01. 18. 03	Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan/ advokasi indikator ketahanan keluarga	Kabupaten/ Kecamatan	40 Orang (kel. Rentan)	55.000.000	APBD		40 Orang (kel. Rentan)	55.000.000
2. 02. 01. 18.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		DP2PA	90 %	100.000.000	APBD		90 %	100.000.000
	Pendampingan Pencegahan, Kekerasan, 1 Eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Jumlah jenis kasus anak yang mendapatkan pendampingan	DP2PA	5 kasus	100.000.000		program baru	5 kasus	100.000.000
	JUMLAH				2.401.500.000				2.489.000.000

Masamba, 2019

KEPALA DINAS,

dr. Hj. NURHUSNAH, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19600207 198710 2 001